

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikenal sebagai salah satu agama besar dunia. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw ini ditegaskan sebagai *rahmatan lil 'alamin* atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Agama ini menjadi agama yang membawa pesan kasih sayang untuk seluruh makhluk di muka bumi.

Apabila dilihat definisinya dari segi bahasa, Islam mengandung empat pengertian, yaitu *damai*, *berserah diri*, *bersih* dan *suci*, serta *selamat* dan *sejahtera*. Islam kemudian menjadi sebuah agama yang juga merupakan system kehidupan mencakup segala hal. Karena itu, Islam bersifat universal meliputi seluruh dimensi ruang, dimensi waktu, dan segala sisi kehidupan manusia (Agus Edi Sumanti dkk, 2009: xii).

Ajaran Islam menganjurkan bahwa hubungan sesama manusia harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penipuan.

Sebagaimana di dalam qaidah ushul fiqh menjelaskan, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha yang nyata dan produktif. Islam juga mengajarkan kepada semua umatnya agar saling membantu dalam segala

sesuatu yang baik, seperti memberi bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukannya dengan tidak dibebani sekecil apapun. Di dalam membantu orang lain haruslah mengandung nilai kebaikan dan merupakan ibadah yang berpahala di sisi Allah Swt, serta mengandung nilai sosial yang sangat tinggi.

Di dalam bermuamalah kita mempunyai beberapa hubungan diantaranya yaitu: hubungan manusia dengan Allah (Hablum minallah/produsen dengan Allah), hubungan manusia dengan manusia (Hablum minannas/produsen dengan konsumen), hubungan manusia dengan alam (Hablum mina alam).

Kehidupan manusia adalah nikmat yang diberikan Allah Swt, dengan segala kebutuhannya Allah menyediakan bumi dan langit beserta segala isinya, bahkan rizki manusia menjadi hak prerogatifnya. Akan tetapi, segala yang disediakan Allah Swt tidak dapat begitu saja dimiliki manusia, karena kehidupan manusia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan oleh peraturan-peraturan Allah untuk dimiliki, sebaliknya ada hak-hak yang dapat dimiliki dengan cara melakukan pemindahan hak milik yang benar menurut peraturannya. Hal demikian itu berkaitan dengan kehidupan manusia yang tidak dapat lepas dari kehidupan dengan sesama manusia, manusia bukan sekedar makhluk individual, tetapi secara mutlak manusia adalah makhluk sosial.

Pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain harus didasarkan pada peraturan-peraturan Allah Swt yang termuat dalam sumber ajaran Islam, yakni al-qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw yang diriwayatkan melalui hadits-haditsnya. Secara fiqhiyah proses perpindahan hak milik antara individu merupakan bagian dari muamalah yang kemudian di bahas secara detail dalam fiqh muamalah. Para fuqaha mendefinisikan fiqh muamalah sebagai aktifitas

manusia untuk menghasilkan hal-hal duniawiyah dalam rangka mengejar kehidupan ukhrawiyah. Ada pula yang mengatakan bahwa fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia (Rachmat Syafie, 2001: 15), secara sempit fiqh muamalah dapat diartikan dengan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Hendi Suhendi, 2010: 3), salah satu pembahasan dalam fiqh muamalah adalah masalah jual beli (*Al-Ba'i*), perburuhan/sewa-menyewa (*Al-Ijarah*) atau jual beli manfaat (*Al-Ba'i al-manfa'ah*)

Di dalam bahasa Arab gaji berarti *ijarah* (بيع القوة) (Hendi Suhendi, 2010: 115). *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al'Twadhu* (ganti) yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Ada juga yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang (Rachmat Syafei', 2001: 122). Dalam istilah lain, *Ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Sunarto Zulkifli, 2003: 42). Pendapat yang diterima dari transaksi *Ijarah* disebut *ujrah*.

Pada prinsipnya upah harus diketahui terlebih dahulu, sesuai hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abd Razaq dari Abu Hurairah, yaitu:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا :
 : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزق عن أبي هريرة)

Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya
 (Abu Bakar Abdullah Ibn Abi Syaibani al-Abasi al-Kufi, Juz VI, tt: 303).

Dalam relitasnya, masalah pengupahan dan kesejahteraan buruh merupakan masalah yang penting, karena upah dan kesejahteraan buruh sangat terkait dengan proses produktifitas suatu perusahaan dan merupakan salah satu unsur dalam upaya peningkatan produksi perusahaan dengan upah yang tentunya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, maka mereka akan termotivasi dalam pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan.

Untuk menentukan pemberian upah yang layak, syari'at Islam memperhatikan asas-asas muamalat yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan. Maka keadilan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak dengan ukuran taraf hidup masyarakat, dan kebajikan menuntut agar jasa yang diberikan buruh mendatangkan keuntungan besar, seharusnya kepada para buruh diberikan semacam bonus, insentif dan lain sebagainya.

Dengan demikian Islam menjelaskan bahwasannya dalam memberikan upah itu harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh para karyawan atau harus sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan tidak boleh memberatkan atau mempekerjakan suatu karyawan dengan upah yang belum diketahui atau upah

yang tidak mencukupi kebutuhan hidup karyawan, bahkan Islam menganjurkan untuk memberi kelebihan atau kecukupan dalam memberikan gaji atau upah.

Setelah melihat pembahasan yang ada di atas, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan tentang pelaksanaan peraturan pengupahan pada suatu home Industri, bahwasannya upah itu harus sesuai atau mencukupi dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan atau buruh.

Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam Surat Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama, 1993: 57).

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing* (M. Syafi’I Antonio, 2001:118). Sebagaimana Nabi Muhammad juga bersaba yang berbunyi, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Nabi Saw pernah berbekam dan memberikan upah bekam kepadanya, sekiranya iya mengetahui hal itu hukumnya makruh ia tidak akan memberikannya. (HR Bukhari dan Muslim) (Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, Juz III, 2005: 54).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) فِي الزَّوَانِدِ أَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. لَكِنْ إِسْنَادُ الْمُصَنَّفِ ضَعِيفٌ وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفَانِ. قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيحٌ

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah upah buruh sebelum keringatnya kering. (HR Ibnu Majah) (Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzauni, Juz I, 2008: 294).

Setelah melihat beberapa hadits di atas bahwasannya suatu upah itu harus diketahui terlebih dahulu sebelum mempekerjakan buruh/karyawan. Akan tetapi pada kenyataannya karyawan atau buruh yang berada di Indonesia ini sangat memprihatinkan, karena upah atau gaji yang diberikan perusahaan pada karyawannya itu belum sesuai atau mencukupi suatu kebutuhan hidup layak.

Sebagaimana studi kasus yang terjadi di beberapa kecamatan mengenai tentang buruh, banyak gaji buruh yang belum sesuai atau mencukupi suatu kebutuhan hidup buruh/karyawannya, seharusnya pemerintah atau dewan pengupahan itu sebelum memberikan gaji kepada karyawan hendaknya melakukan survei terdahulu ke beberapa titik, misalnya: pasar, kecamatan dan lain-

lain (Media Indonesia, Senin, 08 Oktober 2012). Jangan sampai ketika memberikan gaji dan gaji tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berbeda dengan karyawan yang belum mempunyai suatu keluarga atau masih lajang dengan gaji yang belum mencukupi juga akan merasa cukup bagi mereka, akan tetapi berbeda dengan karyawan yang sudah mempunyai suatu keluarga apakah dengan gaji tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup layakanya (KHL).

Home Industri ENDO merupakan suatu pengrajin yang mempunyai banyak karyawan dengan menggunakan dua sistem penggajian diantaranya, yaitu: 1. Gaji Mingguan dan 2. Kejar target.

Yang dimaksud dengan system mingguan disini yaitu suatu karyawan akan mendapatkan suatu gaji yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya atau gaji yang cukup besar dengan syarat karyawan tersebut harus bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam satu minggu atau dua minggu, misalnya suatu keryawan dalam waktu satu atau dua minggu itu mendapatkan 30-50 potong baju, maka gaji yang akan didapatkan oleh karyawan akan bisa mencukupi suatu kebutuhan hidupnya, tetapi jika karyawan tersebut mendapatkan sedikit dalam memproduksinya maka gaji yang akan didapatkan karyawan tersebut belum bisa untuk mencukupi suatu kebutuhan hidupnya, sedangkan yang dimaksud dengan kejar target yaitu karyawan harus bisa mencapai target yang di inginkan oleh Home Industri ONDE tersebut (Hasil Wawancara dengan Pemilik Home Industri Endo pada tanggal 08 Desember 2012).

Dengan demikian apabila karyawan tersebut bisa mencapai target yang diinginkan home industri dengan demikian gaji yang diterima akan bisa mencukupi

kebutuhan hidupnya, tetapi sebaliknya jika karyawan tersebut tidak bisa mencapai target maka gaji yang diberikan atau didapatkan tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits, bahwasannya dalam memberikan upah itu harus diketahui terlebih dahulu sebelum mempekerjakan suatu buruh/karyawan dan dalam memberikan upahnya harus jelas serta sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh/karyawan.

Dengan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PENGUPAHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOME INDUSTRI ENDO DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa dalam peraturan pengupahan, pihak perusahaan mensyaratkan dengan adanya gaji mingguan dan kejar target, misalnya apabila karyawan dalam satu atau dua minggu mendapatkan atau memproduksi 30-50 potong baju maka gaji yang akan didapatkan bisa mencukupi suatu kebutuhan hidupnya atau bagi karyawan yang bisa mencapai target yang diinginkan oleh home industri, maka gaji yang diberikan sesuai dengan apa yang telah kerjakannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perjanjian yang dilakukan oleh Home Industry Endo dengan Karyawannya?
2. Bagaimana Mekanisme Peraturan Pengupahan Yang dilakukan Home Industri Endo terhadap Karyawannya?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Pengupahan yang dilakukan Home Industri terhadap Karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan yang selalu dikemukakan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perjanjian yang dilakukan Home Industri Endo dengan Karyawan;
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Peraturan Pengupahan Yang dilakukan Home Industri Endo terhadap karyawan;
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Pengupahan yang dilakukan Home Industri Endo terhadap Karyawan.

D. Kegunaan Penelitian

Bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmiah bidang hukum Islam dan pemikiran ekonomi Islam sehingga menambah wacana sebagai penguatan kerangka teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan.

Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan masa lalu dan masa sekarang untuk menghadapi masa yang akan datang.

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang disiplin ilmu yang dipelajari serta bagaimana menerapkan teori-teori ke dalam praktek.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu yang tidak dapat dipisahkan di dalam perusahaan adalah buruh dengan upah, karena perusahaan akan mengalami suatu kemajuan apabila suatu karyawan atau buruh dapat bekerja secara profesional dan upah yang sangat memuaskan bagi karyawan atau para buruh.

Konsep ajaran Islam sebagai agama universal, mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan sang pencipta maupun sesama manusia. Salah satu cara bermu'amalah yang dibolehkan oleh Islam adalah upah-mengupah (*ijarah*) yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 1987: 15).

Dalam perburuhan terdiri atas tiga unsur, yaitu majikan, buruh dan upah. Berbicara tentang upah, tentunya kita sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan, guna memenuhi kebutuhan buruh maupun keluarganya serta cerminan keputusan kerja. Sementara bagi pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga harus di optimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja.

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu buruhan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu

persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri atau keluarganya.

Dalam hal bermuamalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumberdaya yang ada. Hal inilah yang menjadi subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Sesuai dengan konsep prinsip dan variabel, sistem ekonomi Islam yang dilakukan sebagai suatu variabel haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ijarah ialah suatu perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai '*iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan (H. Moh. Anwar, 1988: 73).

Satu pihak seperti buruh atau yang menyewakan barang harus memberikan suatu manfaat terhadap barang yang disewakannya, seperti tenaga bagi buruh atau pemakaian rumah bagi yang menyewakan dan barang yang dikerjakan oleh buruh atau rumah yang dipakai oleh penyewa, tetap milik orang yang mempunyai tanah dan rumah tersebut.

Bekenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja (2004: 113-114) sebagai berikut:

1. Asas *tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas *pemerataan*, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas;
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*;
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005: 130) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat;
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Pelaksanaan upah-mengupah (*Ijarah*) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang terdiri dari empat macam yaitu, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-in'iqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. Syarat yang empat itu harus dipenuhi dalam melaksanakan upah-mengupah (Rahmat Syafei', 2001: 125).

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in'in'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat aqid, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya (Rahmat Syafei'i, 2001: 125).

2. Syarat Pelaksanaan (*an-Nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahlih*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3. Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-akad*), yaitu:

- a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama, 1993: 122).

Ijarah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'aqid*.

- b. *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis buruhan jika ijarah atas buruhan atau jasa seseorang.

1. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini".

2. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3. Sewa Bulanan

Menurut Ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan "Saya sewa selama sebulan".

4. Penjelasan Jenis Buruhan

Penjelasan tentang jenis buruhan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

5. Penjelasan waktu

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung kepada buruhan dan kesepakatan dalam akad.

c. *Ma'qud alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara.

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan mesjid sebab diharamkan syara".

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu.

- e. Tidak menyewa untuk buruhan yang diwajibkan kepadanya

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil buruhannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bukannya atau tepungnya untuk dirinya.

- g. Manfaat *ma'qud alaih* dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.

4. Syarat Ujrah (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui;
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Setelah melihat pembahasan yang ada di atas, bahwasannya di dalam memberikan upah itu harus sesuai dengan rukun dan syarat dalam pemberian upah/ujrah, harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran,

Hadits, Departemen Tenaga Kerja (Depnakers), dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Akan tetapi, mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh home industry endo terhadap karyawannya itu belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam pemberian upah salah satunya yaitu: di dalam memberikan upah seharusnya disebutkan dan dalam memberikan upah itu harus jelas, tetapi pada kenyataannya mekanisme yang dilakukan oleh home industry endo terhadap karyawannya upah itu dapat diketahui jumlahnya ketika karyawan tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu satu atau dua minggu.

Dengan demikian, pelaksanaan pengupahan yang diterapkan oleh home industry endo itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, jika upah itu dapat diketahui setelah karyawan menyelesaikannya, maka mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh home industry itu belum relevan dan akan timbul suatu ketidakjelasan dalam pemberian upah.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode deskriptif analitis. Menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007: 103) metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah 15 orang karyawan dan pemilik home industri di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer (Cik Hasan Bisri, 2008: 221), sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang perjanjian pengupahan pada home industri endo, mekanisme peraturan pengupahan pada home industri endo dan tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme peraturan pengupahan pada home industri endo.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Home industri Endo di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara

Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007: 195) wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara yaitu para karyawan dan pemilik home industri Endo.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran;
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.